

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Krusialnya peranan Barang Milik Negara inilah yang menyebabkan pengelolaannya harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar tercapai output yang optimal dari BMN tersebut.

Barang Milik Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur siklus dan tahapan pengelolaannya. Keseluruhan siklus yang berjumlah 11 tahapan ini memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Siklus pengelolaan BMN, antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;

4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagai salah satu dari 11 siklus tersebut menurut PMK Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Kegiatan yang satu ini dapat dikatakan sebagai pondasi atau rencana dasar dari pengelolaan BMN lainnya. Tidak terkecuali pada tahapan pemeliharaan BMN.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMN dilakukan melalui penyusunan RKBMN Pemeliharaan. PMK tersebut juga memberikan definisi RKBMN, yaitu sebagai dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian, RKBMN harus diusulkan setiap tahunnya oleh Kuasa Pengguna Barang. Dokumen tersebut akan diusulkan secara berjenjang hingga ke Pengelola Barang untuk ditelaah dan kelak akan dianggarkan dalam DIPA yang diterima oleh masing-masing instansi.

Selain ditelaah, RKBMN yang diajukan akan dilakukan penelitian oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Serangkaian penelaahan dan penelitian yang dilakukan dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk menetapkan alokasi anggaran terhadap RKBMN yang diusulkan tersebut. Selain itu, ketersediaan dana dan skala prioritas juga menjadi perhitungan tersendiri terhadap pemenuhan perencanaan kebutuhan yang disampaikan.

Pertimbangan tersebut tentunya dapat berdampak pada tingkat kesesuaian dari alokasi anggaran yang diterima oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyampaikan RKBMN. Ketidaksesuaian ini tentunya berimbas pada pemenuhan penyelenggaraan pemeliharaan BMN yang dapat berjalan tidak sebagaimana mestinya sebagai akibat keterbatasan dana tersebut.

Pangkalan PSDKP Batam sebagai salah satu Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya memiliki tanggung jawab di bidang perencanaan pemeliharaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis kepada Bapak Muslani selaku Ketua Subbagian Tata Usaha, didapat informasi bahwa pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdapat keterbatasan dana yang diperoleh. Keterbatasan dana tersebut memiliki dampak pula pada anggaran pemeliharaan BMN yang menjadi terbatas.

Permasalahan di atas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan tinjauan pada salah satu instansi pemerintah terkait pemenuhan RKBMN Pemeliharaan aset instansi tersebut. Penulis juga akan menganalisis dampak permasalahan yang ditimbulkan atas adanya kekurangan dana yang diterima.

Berdasarkan pertimbangan dari uraian di atas, penulis akan membahas hal tersebut dalam sebuah Karya Tulis Tugas Ilmiah yang berjudul “TINJAUAN ATAS KESESUAIAN ANTARA USULAN RKBMN PEMELIHARAAN DAN REALISASINYA DI DIPA PADA PANGKALAN PSDKP BATAM”.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari uraian latar belakang di atas, penulis memberikan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dijadikan sebagai pokok bahasan dalam penulisan KTTA. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana usulan RKBMN pemeliharaan yang disampaikan oleh Pangkalan PSDKP Batam?
2. Bagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang didapat oleh Pangkalan PSDKP tersebut sebagai dasar pelaksanaan anggaran pemeliharaannya?
3. Bagaimana tingkat kesesuaian RKBMN pemeliharaan yang diajukan dengan DIPA yang didapat oleh Pangkalan PSDKP Batam?
4. Apa permasalahan yang dialami oleh Pangkalan PSDKP sebagai akibat dari realisasi RKMBN Pemeliharaan yang didapat?
5. Apa tindakan yang dapat dilakukan sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui komponen-komponen yang diajukan dalam RKBMN pemeliharaan sebagai bentuk perencanaan pemeliharaan BMN dari Pangkalan PSDKP Batam.
2. Untuk mengetahui realisasi anggaran RKBMN pemeliharaan yang didapat oleh Pangkalan PSDKP Batam.
3. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara RKBMN pemeliharaan dan DIPA Pangkalan PSDKP Batam.
4. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pangkalan PSDKP Batam sebagai akibat dari realisasi anggaran RKBMN pemeliharaan dalam DIPA.
5. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait realisasi RKBMN di Pangkalan PSDKP Batam.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pada penulisan karya tulis ini, maka diperlukan ruang lingkup yang jelas dan terarah agar penulisan dapat berjalan secara konsisten serta tidak keluar dari topik pembahasan. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup dengan hanya berfokus pada kesesuaian antara RKBMN yang diusulkan dan realisasinya pada Pangkalan PSDKP Batam. Dengan demikian, jenis BMN yang direncanakan untuk dilakukan pemeliharaan adalah BMN yang perencanaannya dilaksanakan melalui sistem RKBMN serta mengecualikan

perencanaan pemeliharaan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL). Selain pembatasan objek pembahasan, penulis juga membatasi periode historis dari perencanaan yang akan diteliti. Penulis akan meneliti kesesuaian topik di atas menggunakan data dari tiga tahun terakhir. Periode tiga tahun tersebut mencakup periode perencanaan dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

RKBMN pemeliharaan yang diusulkan dilandasi oleh PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Meskipun peraturan ini telah dicabut oleh PMK 153/PMK.06/2021, akan tetapi PMK ini belum berlaku saat penyusunan RKBMN pemeliharaan tahun terakhir dari instansi terkait.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, dengan adanya pelaksanaan tinjauan ini memberikan informasi dan wawasan langsung dalam bentuk praktik lapangan bagi penulis sehingga mengasah pengalaman penulis tentang permasalahan pengelolaan BMN yang terjadi di lapangan. Selain itu, penulisan ini juga sebagai bentuk implementasi dari mata kuliah yang telah dipelajari selama perkuliahan.
2. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk melakukan evaluasi dan mencari jalan keluar dalam perencanaan dan realisasi RKBMN pemeliharaan.

3. Bagi pihak lain atau pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi pemenuhan perencanaan kebutuhan pemeliharaan yang dialami oleh instansi dan mengajak pembaca agar dapat memberikan saran atas setiap kendala yang dialami instansi pemerintah dalam topik tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya, tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk meneliti lebih lanjut terkait kesesuaian RKBMN pemeliharaan dan realisasi yang diterima. Penelitian lanjutan ini dilakukan terutama apabila terjadi perubahan kebijakan atau peraturan yang melandasi perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMN tersebut. lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi, dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang relevan terkait dengan topik KTTA penulis, yaitu mengenai RKBMN pemeliharaan dan kesesuaiannya dengan realisasi pada DIPA instansi yang bersangkutan. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan data dan fakta yang digunakan dalam penulisan KTTA ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab tentang pembahasan akan menguraikan penjelasan mengenai rumusan masalah yang bersangkutan dengan penelitian ini. Secara garis besar berisi tinjauan kesesuaian antara RKBMN pemeliharaan yang diusulkan dan realisasinya pada Pangkalan PSDKP Batam.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan terkait pembahasan yang dihasilkan atas penelitian penulis dari beberapa bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang diharapkan oleh instansi yang bersangkutan.